

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zaman sekarang adalah era reformasi. Dengan bertambah cerdasnya masyarakat Indonesia, timbul pula kebutuhan dan keinginan untuk menambah pengetahuan, mengetahui tentang segala sesuatu yang baru. Informasi berarti keterangan, data, penjelasan tentang suatu hal. Tanpa informasi, manusia zaman sekarang akan menjadi ketinggalan. Tanpa disadari rasa ingin tahu lebih banyak, ingin lebih banyak informasi telah menyusup di segala bidang, termasuk pula bidang medis dan perumahnya. Pasien sekarang ingin tahu lebih dahulu apa yang dideritanya, apa nama penyakitnya, apa obatnya, apa tidak ada alternatif atau cara lain, pasien merasa berhak untuk mengetahui apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya. Pasien juga bisa menolak apa yang dianjurkan oleh dokternya. Dan jika tindakan dokter itu ternyata tidak berhasil, maka pihak dokter harus memberi penjelasan, ini sudah dianggap sebagai hak asasinya sebagai seorang pasien dan manusia.

Setiap orang berhak mendapat hak perawatan kesehatan. Merupakan suatu kewajiban bagi dokter untuk memberi pelayanan bagi setiap orang yang membutuhkan. Pada hakekatnya, hubungan antar manusia tidak dapat terjadi tanpa melalui komunikasi, termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis. Oleh karena hubungan antar dokter dan pasien merupakan hubungan interpersonal, maka adanya komunikasi atau

yang lebih dikenal dengan istilah wawancara pengobatan itu sangat penting.<sup>1</sup> Membuktikan bahwa essensi dari hubungan antara dokter dan pasien terletak dalam wawancara pengobatan. Pada wawancara tersebut para dokter diharapkan untuk secara lengkap memberikan informasi kepada pasien mengenai bentuk tindakan yang akan atau perlu dilaksanakan dan juga resikonya.

Setelah informasi diberikan, maka diharapkan adanya persetujuan dari pasien, dalam arti ijin dari pasien untuk dilaksanakan tindakan medis.

“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”<sup>2</sup>

Dokter harus mendapat persetujuan dari pasiennya sebelum melakukan tindakan medik tertentu. Persetujuan inilah yang biasa disebut *informed consent*, yang diperoleh setelah dokter memberikan informasi tentang penyakit yang diderita pasien dan tindakan medis yang akan dilakukannya. Salah satunya meliputi tindakan operasi medik yang membutuhkan penjelasan detail sebelum dilakukan tindakan oleh dokter. Sebelum diputuskan untuk operasi medik, apapun penyebabnya, pada prinsipnya pihak keluarga inti akan dimintai persetujuan. Untuk itu dokter akan menjelaskan alasan perlunya dilakukan operasi medik ini. Persetujuan ini perlu karena ini merupakan salah satu prosedur baku pelaksanaan operasi. Bila pihak keluarga menyetujui, akan diwajibkan untuk menandatangani semacam surat persetujuan tertulis.

---

<sup>1</sup> King, Joseph H.1986. *The Law of Medical Malpractice in a Nutshell*.West Publishing Co. stimuli. Paul, Minn.

<sup>2</sup> Pasal 56 ayat 1 undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Operasi adalah tindakan pembedahan terhadap tubuh pasien untuk menemukan atau memperbaiki kondisi sakit (patologis) seperti penyakit atau luka, sehingga tubuh pasien dapat bekerja lebih baik.

Masalah yang sering terjadi selama ini adalah minimnya komunikasi antara dokter dengan pasien, akhirnya sering menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai contoh: kasus di Kota Malang, Jawa Timur. Seorang dokter kandungan melakukan operasi medik terhadap pasiennya, tetapi karena sesuatu hal kandungan pasien itu juga diangkat yang menurut dokter karena keadaan darurat (kerobekan rahim). Ternyata operasi pengangkatan rahim itu dilakukan tanpa izin dari siapapun dan suami pasien kemudian menuntut dokter tersebut.

Hal ini juga dipertegas dalam Permenkes tentang *informed consent* pasal 11 yang berbunyi: “ Dalam keadaan pasien tidak sadar/pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medis segera untuk kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun”.

Dalam keadaan seperti tersebut diatas informasi mengenai pasien sangatlah di perlukan secara jelas disamping itu juga informasi yang jelas dan tepat sangat di perlukan untuk menyetujui tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh dokter, namun dibalik itu sering timbul masalah apabila dalam keadaan darurat, *informed consent* belum tentu dapat diperoleh secara langsung dari pasien. Pasien dalam keadaan tidak sadar sedangkan keluarganya tidak dapat segera dihubungi. Di lain pihak, dokter

harus segera memberikan pertolongan. Dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan pasien.

Hal tersebut menandakan bahwa *informed consent* merupakan hal yang sangat penting dan menentukan dalam melakukan terapi oleh dokter kepada pasien.

Pasal 1 Permenkes RI No. 290/MEN.KES/PER/III/2008 menyatakan bahwa:

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau dokter gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”. Jadi, pasien tidak cukup hanya menyampaikan keluhan apa yang dideritanya dan menjawab pertanyaan dokter, ia juga berhak mengetahui penyakit yang dideritanya dan berhak atas informasi tentang tindakan medis dari dokter yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta atau tidak oleh pasien tersebut. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, pasien akan memutuskan untuk menyetujui tindakan medis yang ditawarkan atau menolaknya. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Menurut pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No. 290/MEN.KES/PER/III/2008 dinyatakan bahwa “setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan” .

Tindakan medis yang dilakukan dokter tanpa *informed consent* dapat menimbulkan kekhawatiran dalam diri dokter itu sendiri. Apalagi bila

tindakan medis yang harus dilakukan dokter adalah tindakan operasi yang mengandung resiko tinggi. Seorang dokter yang melakukan pembedahan (operasi) tanpa persetujuan pasien dapat dikenai pasal 351 KUHP sebagai penganiayaan. Bahkan untuk memeriksa dan mengetuk-ngetuk badan (melakukan perkusi) pasien pun diperlukan persetujuan karena hal itu berarti sudah menyentuh hak milik pribadi seseorang. Jadi, setiap tindakan medis harus didahului *informed consent*.

*Informed consent* dilakukan secara lisan apabila tindakan medis itu tidak beresiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan pemeriksaan penunjang medis. Sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung resiko misalnya pembedahan, maka *informed consent* dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien.

Yang tidak boleh dilupakan adalah dalam memberikan informasi tidak boleh bersifat memperdaya, menekan atau menciptakan ketakutan sebab ketiga hal itu akan membuat persetujuan yang diberikan menjadi cacat hukum. Sudah seharusnya informasi diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis tertentu, sebab hanya ia sendiri yang tahu persis mengenai kondisi pasien dan segala seluk beluk dari tindakan medis yang akan dilakukan. Memang dapat dilimpahkan kepada dokter lain atau perawat, namun jika terjadi kesalahan dalam memberikan informasi maka yang harus bertanggung jawab atas kesalahan itu adalah dokter yang melakukan tindakan medis. Lagi pula dalam proses mendapatkan persetujuan pasien, tidak menutup kemungkinan terjadi diskusi sehingga

memerlukan pemahaman yang memadai dari pihak yang memberikan informasi.

Jadi, pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diijinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif dalam operasi medik.

Atas uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG INFORMED CONSENT DALAM OPERASI MEDIK”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaiannya sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana informasi yang diberikan oleh dokter terhadap pasien tentang operasi medik yang mendasari persetujuan.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan HRD*, Pustaka Ilmu; Jakarta, hal 25

2. Bagaimana arti penting persetujuan antara dokter dan pasien setelah pasien mendapat informasi dari dokter tentang operasi medik.
3. Bagaimana tanggung jawab dokter apabila terjadi gugatan malpraktek karena merasa pasien tidak diberi *informed consent* yang jelas dari dokter dalam operasi medik.

### C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu, agar sesuatu yang diharapkan akan memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Mengetahui sejauh mana dokter dapat memberikan informasi kepada pasien sebagai dasar persetujuan medik.
2. Untuk mengetahui persetujuan yang bagaimana yang dilakukan antara dokter dan pasien
3. Untuk mengetahui tanggung jawab dokter apabila terjadi gugatan malpraktek karena merasa pasien tidak diberi *informed consent* yang jelas dari dokter dalam operasi medik.

### D. Manfaat penelitian

Penelitian tentu dimaksudkan untuk memperoleh manfaat, sebab nilai suatu penelitian ditentukan oleh manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari diri sendiri

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai awal penelitian yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
- b. Untuk menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam melakukan penelitian sosial, khususnya penelitian dibidang hukum.
- c. Sebagai pemahaman peneliti tentang *informed consent* di dunia medik.

2. Untuk Ilmu Pengetahuan

- a. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Untuk Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat serta guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya masalah pelaksanaan *informed consent* dalam dunia medik.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran sebagai ilmu pengetahuan yang



bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan dalam mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang ditelitinya.<sup>4</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif, karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum, kaedah-kaedah dan kedudukan hukum tentang *informed consent*.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sateliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terhadap *informed concert* dalam operasi medik.

Alasan menggunakan penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk memaparkan kenyataan-kenyataan aturan yang di undangkan sebagai orientasi dari pada perilaku bagi dunia medik.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta :UI Press, 1986, hal 67.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang meliputi:

#### a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang terdiri dari:

- 1) KUH Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- 3) Peraturan Perundangan tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2009
- 4) Peraturan Perundangan tentang *informed consent*, yaitu:
  - a) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Men.Kes/Per/III/2008
  - b) SK PB IDI No. 319/ PB/ A/4/88
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku mengenai perjanjian;

- 2) Buku-buku mengenai kesehatan dan *informed consent*;
- 3) Makalah-makalah mengenai *informed consent*;

#### b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data tambahan yang diperlukan penulis:

##### a. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta tersedia data yang berkaitan dengan tema penelitian.

##### b. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah dokter dan perawat sebagai pembantu dokter yang bisa memberikan penjelasan secara jelas mengenai *informed consent* terhadap operasi medik dalam dunia medik.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

- b. Studi Lapangan adalah merupakan suatu cara tentang pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Adapun cara pengumpulan datanya dengan melalui 2 tahap:

1) Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian pada rumah sakit swasta di Kotamadya Surakarta mengenai aplikasi *informed consent*.

2) Membuat Daftar Pertanyaan

Membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

3) Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan baik pada pasien maupun para medis dan dokter yang berkaitan dengan *informed consent*.

4) Pengambilan Sample

Pengambilan sample yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel non random yaitu jenis sample purposive. Yaitu medote pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Karena penelitian ini berkaitan dengan informed consent dan juga mengenai operasi medik maka sample ahli dalam penelitian ini adalah dokter yang melakukan tindakan medik operasi<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kuantitatif dan R&D, 2010, 85.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapat data dari penelitian, data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas; peraturan, literatur mengenai *informed consent* yang dikaitkan dengan pendapat responden dan dicarikan pemecahannya dan kemudian dapat disimpulkan.

## F. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Operasi medik
- B. Pengertian dokter dan perawat sebagai pembantu dokter dalam Operasi medik
- C. Pengertian pasien dalam Operasi medik
- D. Pengertian *Informed Consent*

- E. Arti Penting *Informed Consent* dalam Operasi medik
- F. Informasi dari dokter kepada pasien yang mendasari persetujuan dalam Operasi medik
- G. Hubungan Antara Dokter Dan Pasien Setelah Terjadi Persetujuan Medik
- H. Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hubungannya dengan malpraktek Operasi medik

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Pemberian informasi dari dokter kepada pasien sebagai persetujuan pelaksanaan Operasi medik.
2. Pentingnya Persetujuan Antara Dokter Dan Pasien Setelah Pasien Mendapat Informasi Dari Dokter Tentang Operasi medik.
3. Tanggungjawab Dokter Apabila Terjadi Gugatan Malpraktek Dalam Operasi medik.

#### B. Pembahasan

1. Pemberian informasi dari dokter kepada pasien sebagai persetujuan pelaksanaan Operasi medik.
2. Pentingnya Persetujuan Antara Dokter Dan Pasien Setelah Pasien Mendapat Informasi Dari Dokter Tentang Operasi medik.

3. Tanggungjawab Dokter Apabila Terjadi Gugatan  
Malpraktek Dalam Operasi medik.

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

